

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, radikalisme masih menjadi fenomena yang menarik perhatian dan menjadi topik perbincangan yang serius oleh beberapa kalangan. Pasalnya radikalisme muncul sebagai respon dari kondisi yang sedang berlangsung, baik respon yang berupa evaluasi, penolakan maupun perlawanan. Sehingga radikalisme dapat diartikan sebagai spirit perubahan menuju kebaikan. Oleh karenanya tidak heran jika kemunculan radikalisme diiringi dengan beragam motif, antara lain politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama. Di samping itu juga karena radikalisme menjadi salah satu ideologi yang mengalami transformasi dengan cepat dan luas¹.

Meskipun radikalisme lahir dari berbagai arah dan motif tetapi faham ini seringkali disandarkan pada paham keagamaan. Hal ini karena agama mempunyai kekuatan yang sangat hebat melebihi kekuatan-kekuatan lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Radikalisme agama pada dasarnya hadir untuk menegakkan syariat agama dan mempelajari agama sampai pada hal-hal yang prinsip. Radikalisme agama sangat bermakna apabila proses

¹ Abdul Malik, *Geneologi Radikalisme dalam Pesantren (Studi Fenomenologi Pada Pesantren Al- Maida di Bima)*, dalam Laporan Penelitian, Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016, h. 2.

pencapaian tujuannya dilakukan dengan pemahaman keagamaan yang merata. Sehingga tidak ada tendensi untuk mengartikan kata radikalisme secara negatif.

Namun, lambat laun makna positif tersebut bergeser dan mengalami penyimpangan makna menjadi negatif. Penyimpangan ini terjadi apabila radikalisme agama menjadi suatu aksi atau tindakan tanpa disertai pemahaman keagamaan yang merata dan hanya memahami agama secara tekstual dan ditafsirkan sendiri. Ketidakmerataan dalam memahami agama ini menyebabkan kelompok radikal dalam makna negatif fanatik terhadap satu pendapat tanpa menghargai pendapat lain sehingga memiliki pandangan, sikap dan perilaku yang cenderung menganggap kelompoknya paling benar dan kelompok lain salah.

Kemudian cenderung memaksakan keyakinannya pada orang lain seperti mewajibkan orang lain mengerjakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Membolehkan segala cara atas nama agama termasuk tidak segan memaksa dan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang tidak sefaham dengannya, baik antar sesama agama maupun berbeda agama. Berburuk sangka kepada orang lain, dan mengkafirkan orang lain.

Radikalisme yang aktif menuju aksi (radikalisasi) dan tanpa diiringi dengan keagamaan secara merata dapat menjadi modal awal bagi individu atau kelompok untuk membentuk paham baru yang bersifat teror (terorisme), sehingga perlu digaris bawahi bahwa tidak ada terorisme yang tidak melalui proses radikalisme. Sebaliknya, meskipun terdapat sedikit persamaan bahasa yang digunakan antara radikalisme dengan terorisme yakni bahasa perjuangan,

tetapi tidak semua radikalisme dapat mengarah pada terorisme. Hal ini tergantung pada proses perolehan pengetahuan seseorang. Isu radikalisme agama yang bahkan berujung pada gerakan teror kembali mencuat di kancah global tepatnya pasca penyerangan menara kembar *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Nahasnya kelompok yang dicurigai sebagai dalang dan yang bertanggungjawab atas penyerangan saat itu ialah al-Qaeda di bawah komando Osamah bin Laden.

Selain itu, sejarah mencatat bahwa aksi radikal dan teror juga dilakukan oleh kelompok dengan latar belakang agama selain Islam. Seperti peristiwa peledakan bom di Malegaon, Maharashtra dan di Modasa, Gujarat di India yang dilakukan oleh kelompok garis keras agama Hindu di India pada 29 September 2008. Dalam peristiwa itu menewaskan 8 orang dan lebih dari 80 orang mayoritas beragama Islam terluka. Kemudian terjadi kekerasan di Myanmar berupa diskriminasi serta pengusiran paksa warga Rohingya muslim dari tempat tinggal yang dilakukan sejumlah rahib beragama Budha. Selain itu juga di Amerika Serikat kerap terjadi tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok radikal dan teroris Kristen seperti *Army of God* dan *Klux Klan* terhadap masyarakat yang dipandang beda iman kekristenan dengan kelompoknya.²

² Angel Damayanti, *Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam*, dalam Puslitbang Lektur dan Khazanah, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, h. 1.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa radikalisme berlatar belakang agama di atas, maka diketahui bahwa hampir semua negara yang dimana mayoritas masyarakatnya menganut agama tertentu dapat melakukan aksi radikal. Sehingga radikalisme seperti ini tidak adil apabila hanya disematkan pada satu agama tertentu saja. Namun nahasnya dalam penyebarannya, radikalisme seringkali disangkutpautkan dengan Islam. Begitupun di Indonesia, penyebaran paham radikalisme juga seringkali dikaitkan dengan Islam. Hal tersebut karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, sehingga menjadi sasaran berkembangnya radikalisme terhadap ajaran agama Islam. Meski demikian bukan berarti kelompok radikal yang berlatar belakang agama selain Islam tidak ada di Indonesia.

Potensi penyebaran paham radikalisme bermakna negatif yang mengatasnamakan Islam hampir terjadi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya. Secara faktual beberapa kasus yang berhubungan dengan radikalisme di Bima, *pertama*, penangkapan salah satu santri pondok pesantren Umar bin Khatab, MSA, pada 30 Juni 2011 karena menikam Brigadir RS selaku petugas Reskrim Polsek Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kedua*, ABA alias M selaku pengasuh Pondok Pesantren Umar bin Khatab ditangkap lantaran terjadi peledakan yang diduga bom di pesantren Umar bin Khatab Kabupaten Bima, ledakan itu melukai salah satu pengajar pondok. *Ketiga*, Ansyaad Mbai dalam Abdul Malik

mengatakan pada Januari 2012 digagalkannya rencana tindakan teror di Bima oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan kelompok Bima.³

Terkait data empirik di atas dan adanya orang Bima sebagai penganut ideologi radikalisme yang berujung pada terorisme yang ditangkap di Poso Sulawesi Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia (RI) Inspektur Jenderal Polisi M Tito Karnavian menyatakan di hadapan media bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk ke dalam 12 (dua belas) wilayah di Indonesia yang ditandai sebagai zona merah (waspada) dalam penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme, dan rawan untuk dijadikan tempat pelarian, serta persembunyian oknum yang datang dari luar⁴.

Sebab pernyataan tersebut, maka asumsi yang berkembang di masyarakat Bima bahwa masuknya ideologi radikalisme di Bima karena dibawa oleh oknum-oknum tertentu dari luar Bima yang kemudian merekrut anggota baru sebagai jaringan radikalisme baru di Bima. Dilihat dari aspek jaringan penyebarannya, para kaum radikal yang masuk ke Bima berasal dari jaringan Majelis Indonesia Timur (MIT) kelompok Poso yang dipimpin oleh Santoso.⁵

³ Abdul Malik, *Idiologi dan Kulturisasi Pesantren: Studi Pembentukan dan Pergeseran Wacana dan Praktik Radikalisme Pada Pondok Pesantren Salaf di Bima*, dalam Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Mataram, 2018, h. 3.

⁴ Zainal Arifin, *NTB Menjadi Zona Merah Penyebaran Faham Radikalisme*, 2016. Diakses pada 29 Desember 2019. Dari <http://rri.co.id/post/berita/261793/nasional/ntb-menjadi-zona-merah-penyebaran-faham-radikalisme.html>.

⁵ Abdul Malik, *Idiologi dan Kulturisasi Pesantren: Studi Pembentukan dan Pergeseran Wacana dan Praktik Radikalisme pada Pondok Pesantren Salaf di Bima*, Op.Cit., h. 2.

Pernyataan kepala BNPT RI yang mengklaim Bima sebagai wilayah merah radikalisme dan terorisme tersebut dibantah oleh wakil Bupati Bima saat itu H. Dahlan M. Noer, menurutnya pernyataan tersebut terlalu berlebihan. Wakil Bupati Bima memastikan bahwa Bima aman dari kegiatan radikalisme dan apa yang terjadi di Poso tidak menjadi indikator bahwa di Bima rawan aksi teror⁶ melihat selama ini kegiatan-kegiatan yang ada di Bima berjalan dengan damai. Sama halnya dengan wakil Bupati Bima, ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima H. M. Saleh Ismail menegaskan ketidaksepatannya dengan pihak luar yang menyatakan bahwa Bima adalah sarang teroris, karena dari hasil analisis Majelis Ulama Indonesia Kota Bima disimpulkan bahwa Bima hanya menjadi tempat persinggahan dan pelarian oknum teroris yang pernah ke Poso⁷.

Senada dengan pernyataan dua sumber di atas di hadapan media, Drs. H.

A. Rahim Haris, MA mengatakan

“Saya selalu mengatakan tidak ada kegiatan radikalisme dan terorisme di Bima, karena apa ? karena selama ini tidak ada kejadian pemboman oleh masyarakat Bima. Yang ada kegiatan radikal itu terjadi di luar Bima tapi anak-anak Bima yang dicari di luar sana seperti anak buah Santoso melarikan diri ke Bima dan kemudian tertangkap dan ditembak di Bima. Berita di media mengenai Umar bin Khatab juga terlalu berlebihan dan mendramatisir.”⁸

⁶ Syarifudin, Bupati Dahlan: Saya Tegaskan Bima Bukan Daerah Lumbung Terorisme, 2016. Diakses 29 Desember 2019. Dari <https://regional.kompas.com/read/2016/07/22/18513811/bupati.dahlan.saya.tegaskan.bima.bukan.daerah.lumbung.terorisme?page=all>.

⁷ Kahaba, *Ketua Mui: Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan*, 2016. Diakses 29 Desember 2019. Dari <https://kahaba.net/berita-bima/28546/ketua-mui-islam-tidak-mengajarkan-kekerasan.html>.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. A. Rahim Haris, MA Selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima Tanggal 26 Februari 2020.

Hingga saat ini belum ada media yang berani mengakui siapa yang pertama kali memberitakan Bima sebagai zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme.⁹

Meskipun ada bantahan dari beberapa sumber di atas yang kemudian didukung dengan ditangkapnya Abrory dan kematian Santoso sebagai teroris yang disegani pada 18 Juli 2016 lalu, serta tidak adanya tindakan radikal di Bima selama beberapa tahun belakangan ini, tidak menjadi jaminan bahwa jaringan radikalisme yang masuk di Bima telah melemah, kalah, dan berakhir.¹⁰ Kemungkinan jaringan-jaringan radikalisme tersebut untuk hadir dan bangkit kembali tentu saja ada mengingat bahaya radikalisme berpotensi muncul dalam agama manapun dan terjadi dalam situasi apapun. Oleh karenanya keterlibatan berbagai pihak dalam mencegah radikalisme berdimensi negatif begitu diharapkan guna mempersempit ruang gerak dari oknum-oknum radikalisme berdimensi negatif.

Pemerintah Kabupaten Bima sebagai pengayom seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bima perlu menyusun kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme dari hulu hingga hilir dengan melibatkan berbagai kementerian atau instansi terkait seperti pihak Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Begitupun dengan pihak-pihak lainnya yang tergabung dalam lembaga

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Iskandar Zulkarnain Tanggal 06 Maret 2020.

¹⁰ Akhyar, *Disrupsi Non-Kinetik Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan Ekstrimisme Kekerasan di Kota Bima*, dalam Jurnal Administrasi Negara, Bima: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bima vol 16 no. 2, 2019, h. 67.

kenegaraan. Kemudian juga melibatkan masyarakat luas termasuk di dalamnya organisasi-organisasi sosial-keagamaan seperti salah satunya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam keikutsertaannya melakukan pencegahan radikalisme melalui jalan dakwah, hal ini dikarenakan radikalisme membawa nama agama, maka perlu dilakukan pendekatan secara keagamaan pada masyarakat Bima dan diberikan dakwah yang baik serta membimbing masyarakat Bima dalam ranah keagamaan. Memberikan pemahaman keagamaan yang merata pada masyarakat berdasarkan prinsip *wasathiyah* dan menjawab permasalahan umat berdasarkan sudut pandang keagamaan agar masyarakat memiliki bekal dalam menghadapi paham radikal berdimensi negatif, sebab maju dan mundurnya Islam tergantung pada gerakan dakwah yang dilakukan¹¹.

Kegiatan Majelis Ulama Indonesia dalam mencegah radikalisme berdasarkan sudut pandang ilmu dakwah pada hakikatnya adalah proses interaksi penyampaian ajaran agama Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits oleh Majelis Ulama Indonesia pada mad'u. Gambaran proses interaksi atau dakwah yang berlangsung antara Majelis Ulama Indonesia dengan mad'u dari awal hingga akhir disebut dengan pola dakwah. Pola dakwah yang tepat sesuai dengan kondisi objek dakwah sangat diperlukan, tujuannya ialah agar dapat memersuasi

¹¹ Abdul Wahid, *Dakwah di Tengah Gerakan Radikalisme*, dalam Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin vol 2 no. 1, 2019, h. 2.

target dakwah dan mencapai tujuan dakwah yang diharapkan. Apabila da'i tidak menggunakan pola dakwah yang tepat maka aktifitas dakwah tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, mad'u tidak dapat menerima dengan baik isi pesan dakwah yang disampaikan bahkan ketidaksesuaian pola dakwah dengan kondisi mad'u tidak jarang menimbulkan perpecahan umat.

Setiap lembaga atau organisasi keagamaan memiliki pola dakwah yang berbeda-beda tergantung pada penggunaan sudut pandang penentuan pola dakwah. Perbedaan pola dakwah Majelis Ulama Indonesia dengan lembaga keagamaan lainnya semakin terlihat ketika dihadapkan dengan kondisi dan mad'u yang berbeda. Dakwah pencegahan radikalisme menjadi tantangan tersendiri bagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, dimana Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima berupaya untuk mencegah penyebaran radikalisme berdimensi negatif, mencegah terjadinya kekerasan atas nama agama, dan melindungi umat dari radikalisme kebablasan. Dengan begitu dapat mengembalikan citra Islam *rahmatan lil 'alamin*, meminimalisir penyebaran faham yang menyimpang dan memperlihatkan bahwa Bima bukanlah zona merah penyebaran radikalisme kebablasan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penelitian yang berfokus pada pola dakwah Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya untuk mencegah radikalisme ini menarik untuk diteliti. Terutama terkait pola dakwah yang berlandaskan pada proses dakwah Majelis Ulama

Indonesia dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilihat dari sudut pandang pesan dakwah yang disampaikan, metode dakwah yang dilakukan, dan media dakwah yang digunakan Majelis Ulama Indonesia pada mad'u.

Pertimbangan utama memilih Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima sebagai sasaran penelitian karena Majelis Ulama Indonesia menjadi lembaga yang memiliki kapasitas dalam merumuskan pandangan umum mengenai ajaran agama Islam melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Produk-produk intelektual ulama-ulama dalam Majelis Ulama Indonesia menjadi legitimasi oleh masyarakat Indonesia dalam menyikapi hubungan antaragama di Indonesia. Tidak semua orang mampu memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, untuk itu guna mengetahui hukum Islam yang akan diamalkan, maka dapat melalui perantara dan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Pola dakwah Majelis Ulama Indonesia ini menarik untuk diteliti karena melalui pola dakwah dapat mengetahui representasi proses dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima untuk mencegah radikalisme agar dapat melindungi umat dari penyebaran radikalisme. Apabila dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima ini dijalankan dengan baik dan benar maka bukan tidak mungkin bila masyarakat tidak mudah terpapar paham radikalisme dan Kabupaten Bima dapat bersih dari paham dan aksi radikal.

Penelitian ini dinilai relevan dengan kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), karena ditinjau dari aspek yang diteliti menerangkan bahwa Majelis

Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam menyampaikan pesan dakwah pencegahan radikalisme melakukan interaksi dengan masyarakat Kabupaten Bima. Dalam setiap interaksinya tentu saja Majelis Ulama Indonesia melibatkan komunikasi. Penelitian ini juga dikaji dengan teori terkait dengan pola dakwah dan komunikasi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima juga memiliki peran untuk mencegah radikalisme. Pada fokus penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pola dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar jauh dari substansi, maka fokus penelitian dapat diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pesan dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme ?
2. Bagaimana metode dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme ?
3. Bagaimana media dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis pesan dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme.
- 2) Menganalisis metode dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme.
- 3) Menganalisis media dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme.

Kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua sumbangan yakni baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan berdasarkan dua hal tersebut ialah :

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah di bidang dakwah yang berkaitan dengan pola dakwah. Sehingga dikemudian hari ditemukan gagasan-gagasan keilmuan berkaitan dengan dakwah dalam kerangka pemikiran keilmuan para da'i untuk mencegah penyebaran radikalisme pada masyarakat Bima dan mengembalikan citra Islam serta citra Daerah yang sedang atau pernah ditandai sebagai zona merah penyebaran radikalisme. Hasil penelitian pola dakwah yang ditemukan tersebut dapat menjadi perbandingan ataupun rujukan para peneliti yang melakukan penelitian sejenisnya.

2) Secara Praktis

Diharapkan mampu menjadi penguat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dakwah, serta menjadikan sarana belajar dan referensi dalam menggali pola dakwah. Kemudian bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meneladani lembaga yang diteliti ini, sehingga ikut berpartisipasi dalam memberantas radikalisme berdimensi negatif pada beberapa tempat di Indonesia.

1.4 Landasan Pemikiran

Penelitian ini mencoba menguraikan dan memaparkan pola dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam pencegahan radikalisme agama di Kabupaten Bima.

1. Landasan Teoritis

Teori yang menjadi landasan penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan Bambang Saiful Ma'arif. Bambang S. Ma'arif menyatakan bahwa

“Ada 3 (tiga) faktor pembentuk pola komunikasi dakwah, yaitu (1) proses sejarah atau pengalaman masa lalu yang kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bagian dari kepribadian, (2) kapasitas diri sebagai akibat dari faktor pendidikan, pelatihan serta pengalaman hidup diri seseorang dalam menempuh kehidupan, dan (3) maksud dan tujuan dari aktivitas komunikasi sehingga membawa kepada penyesuaian pesan, metode, dan media yang dipergunakan.”¹²

¹² Bambang Saiful Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018) h. 79.

Pada penelitian ini hanya mengkaji faktor ketiga dari pembentuk pola komunikasi dakwah yakni maksud dan tujuan dari kegiatan komunikasi dakwah yang akan membawa pada penyesuaian pesan, metode, dan media yang digunakan untuk mengetahui pola dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima. Sehingga untuk mengetahui pola dakwah seseorang atau lembaga dapat dilihat dari pesan, metode dan media dakwah yang digunakan.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian ini bahwa maksud dan tujuan aktivitas dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima ialah mencegah radikalisme dan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat agar tidak mudah terpapar paham radikalisme. Agar lebih mengetahui pola dakwah Majelis Ulama Indonesia maka perlu kiranya meneliti pada tahap selanjutnya yakni pesan, metode, dan media dakwah Majelis Ulama Indonesia dengan demikian akan terungkap pola dakwah yang digunakan Majelis Ulama Indonesia. Teori pembentukan pola dakwah ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk meneliti dan mengetahui pola dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam pencegahan radikalisme

Pembahasan mengenai pesan dakwah menjadi sesuatu hal yang penting, terlebih dalam penelitian ini membahas pencegahan radikalisme dimana salah satu faktor yang menjadikan seseorang menjadi radikal karena

pemahaman keagamaan yang setengah-setengah, sehingga pesan dakwah pencegahan radikalisme penting untuk diteliti. Secara global pesan dakwah terdiri dari tiga kelompok, yakni mengenai akidah, syariat (ibadah dan muamalat), dan akhlak.¹³

Kemudian metode penyampaian pesan dakwah. Sebagai subjek dakwah, Majelis Ulama Indonesia membutuhkan seperangkat pengetahuan dan kemampuan dalam bidang metode. Penguasaan metode dakwah akan berpengaruh pada penerimaan mad'u pada pesan dakwah yang disampaikan. Dapat dikatakan bahwa metode memiliki peran yang sangat penting, pesan yang memiliki nilai kebaikan sekalipun apabila disampaikan dengan metode dakwah yang kurang tepat, dapat menimbulkan kemungkinan pesan akan ditolak oleh mad'u. Oleh karenanya kemampuan da'i dalam memilih metode dakwah akan mempengaruhi keberhasilan dakwah.

Rumusan terakhir, media dakwah. Media dakwah ialah peralatan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u.¹⁴ Senada dengan itu, Asmuni Syukir menyatakan bahwa media dakwah diartikan sebagai seluruh hal yang dapat dijadikan alat penyampaian pesan dakwah agar tujuan dakwah yang telah ditentukan tercapai.¹⁵ Sebagaimana dengan komponen dakwah yang lainnya, media dakwah juga memiliki peran yang penting. Media dakwah tidak hanya berperan sebagai alat bantu dakwah melainkan

¹³ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 89.

¹⁴ *Ibid.*, h. 113.

¹⁵ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 2001), h. 163.

juga menjadi bagian penting yang mencakup seluruh aktivitas dakwah baik aktivitas yang bersifat sementara ataupun tetap.

Berikutnya dalam mengkaji pola dakwah dalam pencegahan radikalisme di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat menggunakan teori komunikasi persuasif. Teori komunikasi persuasif dianggap sesuai untuk menganalisis pola dakwah dan mendukung teori sebelumnya. Definisi komunikasi persuasif menurut Burgon dan Huffner yang diperoleh dari hasil ringkasan pendapat beberapa ahli terdiri dari dua ringkasan. *Pertama*, komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar sesuai dengan pendapat dan keinginan komunikator (da'i). *Kedua*, komunikasi persuasif ialah proses komunikasi dengan mengajak dan membujuk orang lain yang bertujuan untuk mengubah sikap, keyakinan serta pendapat berdasarkan kehendak komunikator dimana proses ini dilakukan tanpa ada unsur paksaan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam ruang lingkup kajian komunikasi persuasif antara lain, sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik dan konteks situasional.¹⁶ Unsur-unsur tersebut mempunyai kepentingan masing-masing dalam mewujudkan keberhasilan dakwah pencegahan radikalisme. Komunikasi persuasif memiliki beberapa teori yang

¹⁶ Onong Uchyana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 105.

dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan dakwah. Teori persuasif tersebut dikembangkan menjadi beberapa metode, diantaranya :

- 1) Metode asosiasi, adalah penyajian pesan komunikasi dengan jalan menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual, atau sedang menarik perhatian dan minat massa.
- 2) Metode integrasi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi satu, atau mengandung arti kebersamaan dan senasib serta sepenanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal (sikap).
- 3) Metode *pay-off* dan *fear-arousing*, yakni kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya atau memberi harapan (iming-iming), dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk dan tidak menyenangkan perasaan.
- 4) Metode *icing*, yaitu menjadikan indah sesuatu, sehingga menarik siapa yang menerimanya. Metode *icing* ini juga disebut metode memanis-maniskan atau mengulang kegiatan persuasif dengan jalan menata rupa sehingga komunikasi menjadi lebih menarik.¹⁷

Teori tersebutlah yang akan mengungkapkan bagaimana pola dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme di masyarakat Kabupaten Bima dan kedua teori ini juga akan menjadi pijakan dan landasan dalam penelitian yang dilakukan. Teori pembentukan pola dakwah dan komunikasi persuasif sebagai arah agar penelitian tetap ilmiah dan menjaga bias fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian hasil dan analisis penelitian tidak tercampur dengan pengalaman pribadi peneliti dan pengaruh dari pihak lain.

¹⁷ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 126.

2. Landasan Konseptual

Salah satu fenomena yang menarik perhatian di Indonesia ialah munculnya para pemikir yang melahirkan aliran-aliran, dimana di dalamnya menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pelaksanaan dakwah islamiah. Pelaksanaan dakwah islamiah yang dilaksanakan oleh para pemikir ini pada realitanya cenderung ortodoks dan kaku, tidak disesuaikan dengan dinamika kehidupan zaman. Terjemahan ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan hanya dikaji secara tekstual, dan mengabaikan kesejarahan Islam. Kelompok yang tidak sepaham dengannya dalam memahami teks dianggap kafir. Selain itu juga, kelompok ini menginginkan ajaran Islam dipraktikan dalam setiap kehidupan.

Praktik ajaran agama Islamnya pun dilakukan dengan cara yang eksklusif, tidak mengambil dari *manhaj* hukum yang seharusnya. Kelompok ini menganggap bahwa cara yang dipraktikannya adalah yang benar. Orang lain (beda agama) dan muslim yang tidak sejalan dengannya atau di luar cara yang telah dibenarkan oleh kelompoknya adalah salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dianggap musuh yang harus diperangi dan bagi umat muslim mendapatkan predikat sebagai orang yang sesat.¹⁸ Kelompok-kelompok seperti ini disebut sebagai kelompok radikal.

¹⁸ Muhammad Said, *Dakwah Sebagai Ujung Tombak Penanganan Radikalisme Agama di Indonesia*, dalam Jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Papua Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong vol 10 no. 1, 2018, h. 152.

Ide dari kelompok radikal mulanya bertujuan hanya untuk memperoleh perubahan yang lebih baik, akan tetapi cara yang dipilih untuk meraih tujuannya dilakukan melalui sistem paksaan dan kekerasan.¹⁹ Kelompok radikal menganggap bahwa orang-orang yang tidak menggunakan hukum syari'at halal untuk dibunuh. Kelompok radikal menganggap bahwa harta yang dimiliki oleh orang lain merupakan milik Allah sehingga harta-harta milik orang lain tersebut sah juga untuk dimiliki oleh kelompoknya. Bagi kelompok radikal melakukan pencurian, penipuan, dan kekerasan merupakan jalan halal untuk mendapatkan dana bagi organisasinya. Melakukan kekerasan mengatasnamakan agama menurut kelompok radikal ialah suatu kebenaran.

Hal-hal yang dilakukan oleh kelompok radikal ini jika terus dibiarkan akan mengganggu keharmonisan umat dalam kehidupan dan beragama, serta menimbulkan konflik di masyarakat. Citra Islam sebagai agama yang damai, saling menghormati, mengayomi, dan melindungi hilang begitu saja. Oleh karenanya perlu dilakukan pencegahan radikalisme di kalangan masyarakat agar paham-paham radikal tidak menyebar ke masyarakat dan masyarakat menjadi masyarakat yang pandai dan bijak dalam memilih pesan agama yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang.

¹⁹ lin Atiqoh, *Kontribusi Organisasi Pelajar dalam Menangkal Radikalisme (Studi pada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, h. 2.

Penelitian ini akan menguraikan tentang pola dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme di Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masuknya anggota kelompok radikal yang mengatasnamakan agama di Bima, kemudian juga karena adanya penangkapan teroris yang bersembunyi di Bima beberapa tahun yang lalu. Jika radikalisme tidak dicegah, maka akan menimbulkan situasi yang semakin berbahaya bagi citra Islam dan citra Bima Nusa Tenggara Barat.

Pencegahan radikalisme pada dasarnya dapat dilakukan oleh semua kalangan dengan berbagai cara yang menurutnya sesuai untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan radikalisme, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima. Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi atau lembaga keagamaan independen, tidak memiliki pertalian dengan salah satu partai politik, dan aliran-aliran keagamaan Islam di Indonesia. Selain itu Majelis Ulama Indonesia juga merupakan lembaga keagamaan yang membantu pemerintah untuk melindungi umat dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, seperti melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu atau memaksa umat untuk mengikuti keinginannya.

Sebagai upaya mengimplementasi tugasnya mencegah radikalisme, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima melakukan pencegahan dengan menggunakan sistem dakwah, dan mencegah umat muslim agar tidak terpapar ideologi radikalisme. Dakwah menurut Ahmad Ghusuli dalam Wahyu Ilahi ialah pekerjaan untuk mempengaruhi manusia supaya

mengikuti ajaran Islam. Dakwah pada konteks sosial menurut Amrullah Ahmad ialah aktualisasi dari imani yang diwujudkan oleh manusia dalam kegiatan berbagai bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai keislaman pada tataran yang bersifat perseorangan dan yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat.²⁰ Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa melalui dakwah dapat menambah pengetahuan umat tentang agama, melaksanakan dakwah pada umumnya bukan hanya wajib untuk Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi wajib bagi setiap muslim.

Pencegahan radikalisme dengan sistem dakwah yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak hadir begitu saja, melainkan harus memahami dan menafsirkan bagaimana keadaan mad'u, lingkungan sekitar mad'u, serta mengenai radikalisme. Dapat dikatakan bahwa penyampaian atau pelaksanaan dakwah yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Aktivitas keagamaan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat, dalam artian Majelis Ulama Indonesia bertindak sesuai dengan pemaknaannya yang terjadi di lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dakwah yang dilakukan da'i pada umumnya atau Majelis Ulama Indonesia pada khususnya sangat sulit. Da'i harus berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat yang

²⁰ Amrullah Ahmad, *Dakwah dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: DUTA, 1983), h. 2.

heterogen mulai dari yang buta huruf hingga pada kaum intelek, kondisi alam, sosial, dan kultural yang berbeda. Oleh karenanya sebagai da'i, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima harus memiliki kekuatan fisik dan mental serta kesabaran yang cukup.

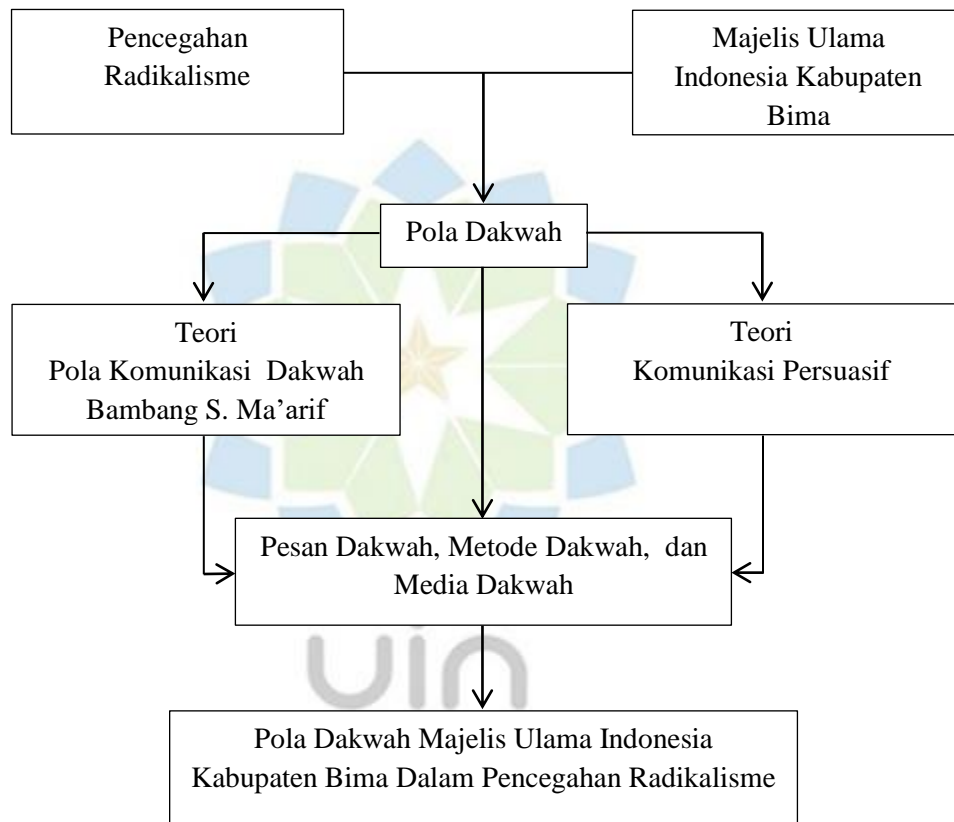
Proses pencegahan radikalisme yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima kepada mad'u dilakukan dengan cara berinteraksi, karena sebagai makhluk sosial Majelis Ulama Indonesia tidak bisa terlepas dari proses interaksi dengan objek dakwahnya baik interaksi secara interpersonal ataupun interaksi secara kelompok. Proses interaksi yang dilakukan memperlihatkan suatu gambaran yang dapat menjelaskan proses dakwah. Gambaran proses dakwah disebut pola dakwah. Pola menurut Siahaan dalam Bambang S. Ma'arif ialah menyangkut pesan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi mengacu pada sesuatu yang membalut inti pesan itu sendiri.²¹ Dapat dikatakan pola dakwah merupakan gambaran bentuk proses dakwah dari awal hingga akhir dan disajikan secara khas yang membungkus seluruh kegiatan dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima.

3. Landasan Operasional

Melakukan penelitian tentu saja memerlukan landasan pemikiran secara operasional sebagai salah satu cara untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memaparkan hasil penelitian

²¹ Bambang S. Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi*, Op.Cit., h. 78.

secara jelas. Adapun landasan operasional penelitian dalam kajian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Landasan Operasional Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti 2020

Berdasarkan gambar landasan operasional di atas menunjukkan bahwa pengkajian pola dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam pencegahan radikalisme dilalui dengan berbagai prosedur berupa penjelasan mengenai pencegahan radikalisme yang kemudian dikaji dengan teori-teori yang dianggap tepat dalam pengkajian dan menjadi pisau analisis.

Pelaksanaan serangkaian langkah operasional penelitian tersebut dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam pencegahan radikalisme yang dilihat dari pesan dakwah, metode dakwah, dan media dakwah yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dalam berdakwah.

